



Pengantar Ilmu Negara

Di Lengkapi dengan Bentuk Negara
dan Pemerintahan Klasik hingga Modern



Mhd. Ansor Lubis
Hera Fauziah Lubis
Rizkan Zulyadi

Tentang Penulis



MHD. ANSOR LUBIS, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1) Konsentrasi Syariah (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Saat ini sebagai Managing Law Firm Mhd. Anzor Lubis, SH, MH, CPM & Partners, penulis tercatat sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas Medan Area; Universitas Harapan Medan; Universitas Dharma Agung Medan (UDA); Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun buku yang sudah diterbitkan oleh penulis ; Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Perizinan, Recht Refleksi Politik Hukum Pidana; Sistem Pemilihan Umum; Proporsional Terbuka & Tertutup; Hukum Tata Negara; Hukum Pemerintahan Daerah; Dinamika Peraturan Daerah.



Dr. (Cand) HERA FAUZIAH LUBIS, S.H., M.H.

Menamatkan SD di Desa Tanjung Aie, SMP dan SMA di Pondok Pesantren Darul Muryid (2006-2012), menempuh Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau (2012-2016), kemudian Pendidikan S-2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2017-2019), dan saat ini sedang mengikuti program Doktor Ilmu Hukum (PDH) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Penulis berprofesi sebagai Dosen Ilmu Hukum di Universitas Medan area, dan Lawyer di Kantor Hukum Perjuangan Medan.



Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 01 April 1969. Pendidikan tinggi dilakukannya pada Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dan gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Dan juga sebagai Anggota ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), Jabatan Akademik sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UMA 2021. Sebagai Dekan Fakultas Hukum UMA 2016 s/d 2021. Sebagai Ketua Kajian Pancasila UMA 2017 s/d sekarang, sebagai Sekretaris Prodi Pascasarjana UMA 2017 s/d 2018. Sebagai Sekjen UMKN Asean UMA 2017 s/d 2019 & Ketua Komite Perlindungan Anak Indonesia 2017 s/d sekarang, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-665-3



**PENGANTAR ILMU NEGARA
DILENGKAPI DENGAN BENTUK NEGARA
DAN PEMERINTAHAN KLASIK HINGGA
MODERN**

**Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH
Dr. (Cand) Hera Fauziah Lubis, SH.,MH
Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH**



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PENGANTAR ILMU NEGARA DILENGKAPI DENGAN
BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN KLASIK HINGGA
MODERN**

Penulis : Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH
Dr. (Cand) Hera Fauziah Lubis, SH.,MH
Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Dian Hari Safitri

ISBN : 978-623-120-465-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, taufik, serta hidayah-Nya. Sehingga para penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.

Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara. Buku Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi dengan Bentuk Negara dan Pemerintahan Klasik hingga Modern ini terdiri atas 6 bab, yaitu:

1. Pendapat Ahli Tentang Negara dan Unsur Negara
2. Teori Asal Mula Negara dan Berkembangnya Negara
3. Teori Tujuan Negara
4. Macam-Macam Tipe-Tipe Negara di Dunia
5. Bentuk Negara dan Pemerintahan
6. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat, maupun isi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis selaku penyusun, menerima segala kritik dan juga saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAPAT AHLI TENTANG NEGARA & UNSUR NEGARA.....	1
A. Istilah Negara.....	1
B. Unsur-Unsur Negara.....	10
BAB 2 TEORI ASAL MULA NEGARA DAN BERKEMBANGNYA NEGARA	19
A. Teori Ketuhanan (Theokratis).....	19
B. Teori Kekuasaan	20
C. Teori Perjanjian Masyarakat	23
D. Teori Hukum Alam	27
E. Teori Kedaulatan	30
F. Kedaulatan Hukum.....	34
G. Ajaran Kedaulatan.....	36
BAB 3 TEORI TUJUAN NEGARA	39
A. Lord Shang (1600-1046).....	39
B. Niccol Machiavelli (1469-1527).....	40
C. Dante Aligheri (1265-1321).....	42
D. Imanuel Kant (1724-1804).....	43
E. Jacobsen dan Libman (1915-1970)	43
F. J Barenst (1950 – 1597).....	44
G. Thomas Hobbes (1588-1679)	46
H. Plato (427 – 347)	47
I. Jean Bodin (1530-1596)	48
J. Kaum Sosialis	48
K. Kaum Kapitalis	49
BAB 4 MACAM-MACAM TIPE-TIPE NEGARA DI DUNIA.....	50
A. Negara Timur Kuno/ Purba.....	50
B. Tipe Negara Yunani Kuno	55
C. Tipe Negara Romawi Kuno	57
D. Tipe Negara Abad Pertengahan.....	60

	E. Tipe Negara Hukum	61
BAB 5	BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN	75
	A. Bentuk Negara	75
	B. Sistem Pemerintahan	79
	C. Sistem Pemerintahan Presidensial	94
	D. Sistem Pemerintahan Parlementer	112
	E. Sistem Pemerintahan Campuran	120
	F. Sistem Pemerintahan Referendum	137
BAB 6	KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA..	141
	A. Pengertian Konstitusi.....	141
	B. Konstitusi Menurut Para Ahli	141
	C. Sifat dan Bentuk Konstitusi	144
	D. Materi Muatan Konstitusi.....	146
	E. Kedaulatan dalam Konstitusi	147
	F. Tafsir Konstitusi	153
	G. Perubahan Konstitusi.....	155
	DAFTAR PUSTAKA	160
	TENTANG PENULIS	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Skema Cycles Teory	90
Gambar 5. 2. Sistem Pemerintahan Presidensil Amerika Serikat	111
Gambar 5. 3. Sistem Pemerintahan Parlemen Inggris	118
Gambar 5. 4. Sistem Pemerintahan Campuran	123
Gambar 5. 5. Sistem Pemerintahan Swiss	134
Gambar 5. 6. Sistem Pemerintahan Campuran Prancis	137

BAB 1

PENDAPAT AHLI TENTANG NEGARA DAN UNSUR NEGARA

A. Istilah Negara

Istilah negara berasal dari istilah *statum* atau status sejak 104-43 SM. Cicero mengartikannya sebagai *standing* atau *station* yang berarti kedudukan. Kata negara berasal dari bahasa *Sansekerta* *nagara* atau *nagari* yang berarti kota. Pengertian negara secara umum; negara adalah sekumpulan manusia yang berada di wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan yang sah secara hukum dan memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.

Secara etimologi, istilah negara diadopsi dari beberapa bahasa negara di dunia ini. Diantaranya adalah dari bahasa Belanda "*STAAT*". Kata *Staat* itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata *status* atau *statum* yang berarti keadaan yang tetap dan tegak, atau sesuatu yang bersifat tegak dan tetap. Timbulnya istilah negara saat pertama kali kurang lebih bersamaan dengan timbulnya istilah *Lo Stato* dari Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul *Il Principe*. Pada waktu itu, istilah *Lo Stato* diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah tertentu.

Begitu juga dengan sekarang ini istilah negara yang dikenal sekarang ini merupakan istilah yang muncul pada zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad Pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi *L'etat* dalam

BAB 2

TEORI ASAL MULA NEGARA DAN BERKEMBANGNYA NEGARA

A. Teori Ketuhanan (Theokratis)

Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang-Undang Dasar negara, seperti : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” atau “*By the grace of God*”. Penganut teori theokrasi modern adalah Frederich Julius Stahl (1802–1861). Dalam bukunya yang berjudul “*Die Philosophie des recht*”, ia menyatakan bahwa negara secara berangsur-angsur tumbuh melalui proses evolusi : Keluarga-Bangsa-Negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kekuatan manusia, melainkan disebabkan kehendak Tuhan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, teori theokratis tidak dipraktekkan lagi, sudah tertinggal jauh³². Beberapa pelopor teori theokratis yang lain.

³² I Gde Pantja Atawa. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 47

BAB

3

TEORI TUJUAN NEGARA

Setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Dilain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Teori tujuan negara dapat digolongkan menurut jamannya, yaitu

A. Lord Shang (1600-1046 SM)

Lord Shang hidup pada abad ke-4. ia seorang Perdana Menteri pemerintahan Tiongkok, berasal dari daerah Yang, karena itu teorinya disebut juga "Teori Shang Yang". Buku hasil karyanya yang terkenal dalam bahasa Inggris dinamakan "*A Clasical of the Chinese School of Law*". Pendapat-pendapat dari Lord Shang itu dipaparkan oleh Denyvendak dalam bukunya yang bernama "*Book Lord of Shang*".

Menurut Lord Shang tujuan utama dari negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa menurut Lord Shang pada setiap negara selalu terdapat dua subjek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat, artinya kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar, maka negara akan lemah, sedangkan sebaliknya bila rakyat lemah, bodoh dan miskin, negara akan kuat. Ia menyatakan bahwa dalam bahasa asing "*a weak people means a strong state and a strong state means a weak people. There fore a country, wich has the right way, a concerned*

BAB

4

MACAM-MACAM TIPE-TIPE NEGARA DI DUNIA

Dalam sejarah pertumbuhan ilmu negara, tipe-tipe pokok negara dapat dibagi atas lima bagian yaitu⁶³:

- A. Negara Timur Kuno/Purba
- B. Negara Yunani Kuno
- C. Negara Romawi Kuno
- D. Negara Abad Pertengahan
- E. Negara Hukum.

A. Negara Timur Kuno/ Purba

Tipe negara timur purba ini bersifat tirani, monarkhi dan teokratis, raja berkuasa penuh atas segala keputusan atau aturan-aturan yang berlaku di kerajaannya tanpa adanya pertentangan dari masyarakat, penguasa (raja) berbuat sesuai kewenangannya, raja merangkap sebagai dewa oleh masyarakat. Kekuasaan raja ini bersifat absolut (mutlak). Turun temurun dan kepemimpinan raja sampai semur hidup. Menurut Aristoteles sistem monarkhi dapat di bagi 3 yaitu ;

1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan

⁶³ Moh. Kusnardi, Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 118.

BAB 5 | BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara

Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kedaulatan sebagai atribut yang esensial. Meskipun dianggap sebagai suatu konsep yang dipertentangkan dan tidak jelas bagi beberapa ahli politik, kedaulatan masih dianggap penting dalam studi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu politik, tata negara bahkan hubungan internasional⁸⁹. Francis W. Coker, dalam Isjwara mengatakan bahwa konsep kedaulatan itu sendiri sama penting sebagaimana konsep nilai dalam ilmu ekonomi.

Klasifikasi negara berdasarkan kedaulatan ini secara khusus didasarkan pada kriteria distribusi kekuasaan secara resmi antar bagian tingkatan pemerintahan dalam suatu negara. Kriteria distribusi kekuasaan ini bersifat vertikal yaitu pembagian kekuasaan dari tingkatan pemerintahan tertinggi sampai ke tingkatan terendah, atau sebaliknya. Karena itu pengklasifikasian negara berdasarkan kedaulatan ini merupakan pengklasifikasian susunan atau struktur negara dengan berbagai implikasinya dalam penyelenggaraan negara. Sedemikian pentingnya struktur atau susunan negara ini sehingga secara eksplisit dinyatakan di dalam konstitusi di beberapa negara tertentu, termasuk di Indonesia⁹⁰.

⁸⁹ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Binacipta,1982), hal. 106

⁹⁰ Bakhri, *Ilmu Negara: Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*,(Depok: Rajawali Pers,2019), hal. 241

BAB 6

KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi (*constitution*) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (*Grundgezets*), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) Konstitusi tertulis dan; 2) Konstitusi tak tertulis.

B. Konstitusi Menurut Para Ahli

1. K. C Wheare

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.¹²⁰ Pandangan ini memberikan gambaran bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah negara. Dengan pemikiran seperti itu timbul

¹²⁰ Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal. 13

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintah Konstitusional diIndonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Abu Daud Busroh. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abul A'la Al- Maududi. 1990. *Hukum Dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan
- Abdul Ghofar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press
- Arief Budiman. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Asmawi rewanayah. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: CV. Yusaintrans Prima
- Azhary. 2003. *Negara Hukum Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta: Kencana
- Bagir Manan. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Menurut UU Nomor Tahun 2006*. (Yogyakarta: FH UII Press)
- Bachsan Mustafa. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bakhri. 2019. *Ilmu Negara: Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, (Depok: Rajawali Pers
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan XIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Brian Z Tamanaha. 2004. *On the Rule of Law*, Cambridge University Press

- Cholisin. *Ilmu Negara*. 2007. Jakarta: Universitas Terbuka
- C.S.T., Kansil, dan Christine Kansil. 2007. *Latihan Ujian Ilmu Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.F. Strong. 1996. *Modren Political Constitutions*, London: Jakson Limited, Lihat Dalam Buku Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dahlan Thaib. 1989. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo
- Dahlan Thaib. 20013. *"Implementasi sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945" dalam Muntoha, Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*,(Bantul: Kaukaba Dipantara
- Dedy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara. 2006. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia
- Frans Magnis Suseno. *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-Teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius
- Gustomi, R., 2004. "Tentang Negara dan Bangsa Sesuatu yang Belum Selesai di Antara Kita", *Jurnal Transformasi*, Vol. 1, Nomor 2, Februari
- Hague, R dan Harrop. 2004. *Comparative Government and Politics: Introduction*, Palgrave Macmillan, New York
- Huda, Ni'matul. 2012. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haula Adolf. 1991. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Rajawali Press
- Hilaire Mc Coubrey and Nigel D. White. 1999. *Textbook and Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited
- Hazairin. 1973. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Binacipta,1982), hal. 106
- Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga

- I Gde Pantja Atawa. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama
- Ismatullah, Deddy dan Gatara, Asep A. Sahid. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka Setia
- Irwan Yulianto. 2012. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Volume 10 No. 2 Jurnal Online Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, November
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- J. H. Rapar. 2014. *Filsafat Politik Plato*, dikutip dari Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga
- J.J Von Schmid. 1980. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)*, Jakarta: PT. Pembangunan
- K.C. Wheare. 1952. *Modern political Constitutions*, (London, Oxford University Press
- Lijphart. 1992. *Parliamentary versus Presidential Government*, (Oxford: Oxford University Press
- Magstadt. 2006. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, And Issues, Seventh Edition*, Belmont: Thomson Wadsworth
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mochtar Pakpahan. 2006. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera
- Moh. Kusnardi, Bintan R Saragih. 1998. *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama,
- Muntoha. 2009. Demokrasi Dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustium*, Vol 16
- M. Solly Lubis. 1975. *Ilmu Negara*. Bandung: Alumni

- Mukti Fajar.1993. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Widya Gama Press
- Padmo Wahjono. 1999. *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta: Melati Study Group
- Platon. 2018. *Theory Of The State With Comments And Explanations*, (Moscow: ACT Publishing House
- Ramdlon Naning. 1983. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Rafar. 1993. *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ranney. 1996. *The Governing of Men*, Holf, Rinehart and Winston, New York
- Romi Librayanto. 2013. *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*, Makassar: Arus Timur
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*,Yogyakarta: Genta Publishing
- Sarjoeno Soekanto. 1997. *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni
- Sobirin Malian. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- Soehino. 1990. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- S.F. Marbun. 2001. *Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Suganda wiranggapati. 2013. “ *Sejarah nasional Indonesia dan dunia” dalam Muntoha, Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, (Bantul: kaukaba dipantara
- Subekti. 1996. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikmo Mertokusumo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sri Seomantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pemandangan*, Badung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sri Seomantri. 1992. *Bunga Ramapai Hukum tata Negara Indonesia*, (Bandung: Bandar Madju

- Sri Soemantri. 1979. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni
- Strong, C.F . 1966, *Modern Political Constitution: an introduction to the comparative study of their history and existing forms*, Sidgwick & Jackson, London
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenas Media
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak
- Tahir Azhary. 1974. *Ilmu Negara*, Jakarta: Ghalia
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2014. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negara Asing*, dikutip dari Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga
- Victor Situmorang. 1978. *Intisari Ilmu Negara*. Jakarta: BinaAksara
- Victor. 1978. *Intisari Ilmu Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

TENTANG PENULIS

Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH. CPM



Penulis dilahirkan di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi *Siyasah* (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Saat ini sebagai Managing Law Firm Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH. CPM & Partners, penulis tercatat sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas Medan Area; Universitas Harapan Medan; Universitas Darma Agung Medan (UDA); Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun buku yang sudah diterbitkan oleh penulis ; *Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Penitentiare Recht; Refleksi Politik Hukum Pidana; Sistem Pemilihan Umum: Proposional Terbuka & Tertutup; Hukum Tata Negara; Hukum Pemerintahan Daerah; Dinamika Peraturan Daerah; Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi Dengan Bentuk Negara Dan Pemerintahan Klasik Hingga Modern.*

Dr. (Cand) Hera Fauziah Lubis, SH.,MH



Menamatkan SD di Desa Tanjung Ale, SMP dan SMA di Pondok Pesantren Darul Mursyid (2006-2012), menempuh Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau (2012-2016), kemudian Pendidikan S-2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2017-2019), dan saat ini sedang mengikuti program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Penulis berprofesi sebagai Dosen Ilmu Hukum di Universitas Medan area, dan Lawyer di Kantor Hukum Perjuangan Medan.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH

Penulis di Lahirkan di Bengkulu pada tahun 1969. Pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dan gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara dan juga sebagai Anggota ADI (Asosiasi Dosen Indonesia). Jabatan Akademik sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UMA 2021. Sebagai Dekan Fakultas Hukum UMA 2018 s/d 2021. Sebagai Ketua Kajian Pancasila UMA 2017 s/d sekarang, sebagai Sekretaris sebagai Sekretaris Prodi Pascasarjana UMA 2017 s/d 2018. Sebagai Sekjen UMKN Asean UMA 2017 s/d 2019 & Ketua Kerjasama Perlindungan Anak Indonesia 2017 s/d Sekarang, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.